

## MODEL TATA KELOLA PON XX TAHUN 2021 PROVINSI PAPUA (PENERAPAN RESULT BASED MANAGEMENT)

Boy Piter Nizu Kekri<sup>1</sup>

[boypiters.kekri@feb.uncen.ac.id](mailto:boypiters.kekri@feb.uncen.ac.id)

Hesti Murwaniputri<sup>2</sup>

[hesti.murwaniputri@feb.uncen.ac.id](mailto:hesti.murwaniputri@feb.uncen.ac.id)

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih,

### Abstraksi:

Penelitian ini memiliki tujuan umum, merumuskan proses kebijakan tata kelola PON XX tahun 2021 Provinsi Papua. Model penyusunan tata kelola PON XX tahun 2021 Provinsi Papua menerapkan pengembangan model interaksi *miles* dan *huberman* serta *results based management (RBM)*. Penelitian ini memaksimalkan data kualitatif melalui sumber data sekunder, konsep dokumentasi data dan informasi melalui studi kepustakaan melalui teknik *web scraping*. Metode analisis data dan interpretasi ialah konten analisis. Hasil penelitian ini menemukan kecenderungan *expert evidence* menyatakan (1) *Assessment*: Memperhatikan pemanfaatan utilitas infrastruktur dan kebijakan tata kelola pasca PON XX tahun 2021 Provinsi Papua; (2) *Envision*: PON XX tahun 2021 Provinsi Papua harus berdampak pada sosial ekonomi dan rasa nasionalisme masyarakat Papua; (3) *Plan*: Penyusunan kebijakan tata kelola pemanfaatan PON XX tahun 2021 Provinsi Papua. Berbagai konten yang diperoleh dari *expert evidence*, menjadi dasar dalam penyusunan hirarki kebijakan tata kelola PON XX tahun 2021 Provinsi Papua. *Result Based Management* menemukan terdapat 4 luaran level *impact* yang menjadi tantangan pengelolaan pasca PON XX tahun 2021 Provinsi Papua dimasa mendatang, pada level *outcome* terdapat 4 luaran, sedangkan untuk level *output* dan level *process* masing-masing terdapat 6 luaran, selanjutnya level hirarki *input* membutuhkan minimal 5 luaran.

**Kata Kunci** : *Results Based Management*, Manajemen Strategik, PON XX Tahun 2021 Provinsi Papua

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Didasari berbagai tantangan dalam pembangunan yang terdapat di Provinsi Papua, pemerintah dituntut kreatif dan memiliki inovasi untuk pembangunan di Provinsi Papua, berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong kesetaraan dan mengurangi kesenjangan pembangunan di Provinsi Papua seperti dilansir dalam PUPR (2021) bahwa pemerintah berkomitmen sebagai penyedia infrastruktur di tanah Papua yang diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan, mengurangi tingkat kemahalan dan bagaimana negara berkomitmen dalam pemerataan pembangunan. Komitmen ini tergambarkan jelas melalui alokasi APBN Kementerian PUPR bahwa tahun anggaran 2021 sekitar Rp 6,12 T dialokasikan untuk memicu pembangunan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam (SDA), peningkatan jalan dan jembatan, permukiman, dan akses perumahan bagi masyarakat. Hal serupa dipertegas dalam KSP (2021) bahwa pembangunan di Provinsi Papua harus masif dan merata sebagai modal pengungkit kesejahteraan masyarakat dan hal ini pun menjadi harapan Presiden RI Joko Widodo untuk Provinsi Papua.

Kebijakan nasional terkait pelaksanaan PON XX tahun 2021 Provinsi Papua (PON XX/ PON XX Papua) merupakan strategi percepatan pembangunan sehingga diharapkan pemerintah Papua mampu mengungkit perkembangan sosial, budaya dan ekonomi masyarakatnya. Pelaksanaan PON XX tahun 2021 Provinsi Papua juga memperhatikan strategi kewilayahan dimana lokus pelaksanaan PON XX meliputi Kabupaten Merauke (Anim Ha), Kota Jayapura (Mamta), Kabupaten Jayapura (Mamta), dan Kabupaten Mimika (Mee Pago). Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menyampaikan bahwa dalam rangka mendukung sukses pelaksanaan PON XX tahun 2021, APBN periode tahun anggaran 2018-2021 dialokasikan diperkirakan mencapai total angka Rp 10,43 T (Kompas, 2021). Tentunya alokasi ini ditujukan untuk pembangunan infrastruktur baru sejumlah cabang olahraga di pertandingan PON XX Tahun 2021. Dikutip dalam Presidenri (2021), menjadi suatu kebanggaan bagi Provinsi Papua dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bahwa saat ini terdapat stadion yang memiliki kualitas terbaik di antara Asia Pasifik berada di tanah Papua. Dukungan kapasitas fiskal yang besar dalam rangka mensukseskan PON XX Tahun 2021, tentunya tidak hanya berdampak pada sukses prestasi pelaksanaan PON XX, namun memberikan efek langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat

Papua. Oleh sebab itu, poin penting ialah pengelolaan investasi yang besar perlu dikelola dengan baik khususnya aset pasca pelaksanaan PON XX Tahun 2021, sehingga investasi negara dalam bentuk utilitas infrastruktur dapat dioptimalkan oleh Provinsi Papua. Melalui beberapa narasi tentang tujuan dan harapan pelaksanaan PON XX, serta alokasi kapasitas fiskal yang sangat besar guna mendukung investasi PON XX, maka perlu dipetakan perencanaan model tata kelola PON XX tahun 2021 Provinsi Papua dengan menerapkan konsep *result based management (RBM)*.

## B. Tujuan Penelitian

Fokus substansi pada manajemen strategi pengelolaan kebijakan PON XX tahun 2021 Provinsi Papua, sehingga tujuan umum penelitian ini merumuskan proses kebijakan tata kelola PON XX, sedangkan secara khusus tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi potensi teoritis pengembangan model kebijakan pengelolaan PON XX tahun 2021.
- 2) Memetakan model tata kelola PON XX tahun 2021 Provinsi Papua berdasarkan *result based management (RBM)*.
- 3) Menyediakan temuan ilmiah sebagai dasar perencanaan kebijakan pasca PON XX tahun 2021.

## LANDASAN TEORI

### A. Kajian Teori

#### 1. Konsep Olahraga Nasional

Menurut UUD No.3/2005 bahwa pada pasal (3) menyebutkan Keolahragaan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat, sedangkan pasal (4) menjelaskan bahwa Keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa. Selain itu Konsep Olahraga Nasional dijelaskan secara operasional melalui PP No.16/2007 dengan tegas pada Pasal (10), Ayat (1) Pekan olahraga nasional diselenggarakan dengan tujuan: a) memelihara persatuan dan kesatuan bangsa; b) menjaring bibit atlet potensial; c) meningkatkan prestasi olahraga.

#### 2. Konsep Pengembangan PON XX Tahun 2021 Provinsi Papua

Konsep dikutip dari dokumen Bappeda (2015) konteks penyelenggaraan PON XX di Provinsi Papua, maka perumusan visi PON XX di Provinsi Papua kedepan, ialah terwujudnya pengembangan infrastruktur dan ekonomi wilayah, untuk mendukung penyelenggaraan PON XX di Provinsi Papua. Sebagai bagian dari upaya menjadikan Papua sebagai pusat pembinaan dan pendidikan olahraga berprestasi internasional di Indonesia Timur dan Rumpun Melanesia. Terdapat upaya umum yang hendak dilaksanakan yaitu:

- a. Mengembangkan Infrastruktur Olahraga dan Infrastruktur wilayah pendukung penyelenggaraan PON XX di Provinsi Papua.
- b. Mengembangkan perekonomian wilayah dan pariwisata daerah.
- c. Mewujudkan upaya pemanfaatan aset dan kelembagaan pengelolaan aset pasca PON XX di Provinsi Papua.

#### 3. Goal Setting Theory

Dikemukakan oleh Locke (1968) sebagai teori utama (*grand theory*) yang mengatakan adanya hubungan yang tidak terpisahkan antara penetapan tujuan dan kinerja. Luneburg (2011) hal serupa juga ditegaskan bahwa kinerja atas sasaran (tujuan) memiliki dampak yang kuat bagi perilaku komponen organisasi dan hasil kinerja pada sebuah kelembagaan.

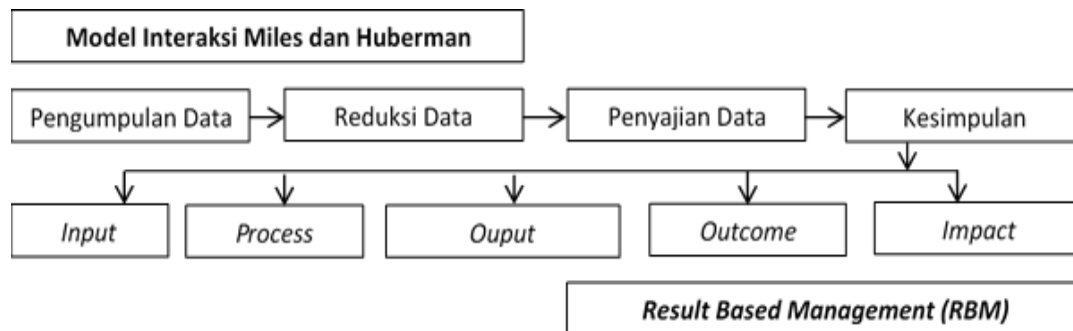
#### 4. Result Based Management (RBM)

ialah sebuah pendekatan. Kusek dan Rist (2004) menyatakan RBM merupakan alat pengukur performansi yang membantu pihak pembuat *policy* dan keputusan dalam menyelusuri perkembangan dan pengaruh dari program, kegiatan ataupun *policy* yang dibentuk. Menurut Solechan dan Prasandy (2016) bahwa Evaluasi performansi terhadap organisasi sangat penting dilakukan untuk memahami bagaimana manajemen berkontribusi terhadap

tujuan dan strategi organisasi. Selain itu, konsep *Result Based Management (RBM)* menurut IPQI (n.d) merupakan strategi manajemen melalui umpan balik melingkar untuk meraih sasaran strategis. Melalui RBM, semua individu yang berkontribusi langsung atau tidak langsung, memetakan semua proses bisnis, produk dan jasa mereka, untuk menunjukkan seberapa besar kontribusi mereka terhadap *outcome* atau dampak. *Outcome* organisasi bisa berupa: *Output* fisik: seperti kuantitas produk, bentuk, jumlah atau perubahan rupa, Perubahan : seperti perubahan mutu, komitmen, keterlibatan. Atau bisa kontribusi terhadap tujuan yang lebih tinggi (*higher goal*).

## METODE PENELITIAN

Lokus pelaksanaan penelitian ini ialah Provinsi Papua, sedangkan pendekatan ilmiah menerapkan konsep induktif melalui asumsi utama bahwa perencanaan kebijakan tata kelola PON XX tahun 2021 Provinsi Papua yang baik, sepatutnya mendorong kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pada proses manajemen data dan informasi, data kualitatif merupakan rujukan utama, beberapa konsep mengatakan seperti dalam Nugrahani (2014) menginterpretasikan data berdasarkan pengkajian, untuk mencari makna dan implikasinya yang lebih luas sebagai hasil penelitian, data itu dapat memperkaya, jika benar-benar detail, terfokus dan padat tentang pandangan partisipan. Menurut sumbernya maka pengumpulan data sekunder melalui teknik studi kepustakaan merupakan keputusan utama penelitian ini, implementasi pengumpulan data sekunder pada media *online* melalui strategi *web scraping*, Ayani *et al* (2019) menyatakan proses pengambilan sebuah dokumen semi-terstruktur dari internet, umumnya berupa halaman *website* dan menganalisis dokumen tersebut untuk diambil data tertentu dan digunakan bagi kepentingan lain.



Sumber: Penulis, Tahun 2022

Gambar 1. Pengembangan Model Analisis Data

Model analisis data penelitian ini menggabungkan proses model interaksi *miles* dan *huberman*, serta *result based management* melalui teknik konten analisis. Beberapa tahapan dalam proses analisis data model pengembangan ini: (1) Tabulasi dan analisis opini *expert evidence* (*interaksi miles dan huberman*), berdasarkan kriteria manajemen kinerja *assessment*, *plan*, dan *envision*. Hasil pada tahapan ini ialah hasil analisis kecenderungan opini *expert evidence* terkait asumsi pengelolaan kebijakan PON XX tahun 2021 Provinsi Papua yang mampu mendorong kinerja pembangunan di Provinsi Papua.

Tabel 1. Tabulasi dan analisis opini *expert evidence*

Unit Analisis	Sumber Data	Fokus <i>Expert Evidence</i>				
		1	2	3	4	5
<i>assessment</i>	Media Online	-	-	-	-	-
Σ Nilai		-	-	-	-	-
<i>envision</i>	Media Online	-	-	-	-	-
Σ Nilai		-	-	-	-	-
<i>plan</i>	Media Online	-	-	-	-	-
Σ Nilai		-	-	-	-	-

Sumber: Penulis, Tahun 2022

(2) Penyusunan *Result Based Management (RBM)*, melalui hasil pemetaan opini *expert evidence* ditemukan konten yang berasal pemerintah dan non pemerintah, terkait perencanaan pengelolaan dan juga dampak dari PON XX tahun 2021. Hasil utama yang ditemukan dalam tahapan ini ialah kerangka logis tata kelola PON XX tahun 2021 Provinsi Papua sebagai berikut.

Tabel 2. Model Tata Kelola PON XX Tahun 2021 Provinsi Papua

<b>Hierarchy</b>	<b>Performance</b>	<b>Means Of Verification</b>	<b>Assumption</b>
<i>Result</i>	<i>Impact</i>	-	-
	<i>Outcome</i>	-	-
<i>Implementation</i>	<i>Output</i>	-	-
	<i>Process</i>	-	-
	<i>Input</i>	-	-

Sumber: Solechan & Prasandy, Tahun 2016

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan UU No.3/2005 pekan olahraga nasional (PON) adalah pesta rakyat ini membentuk watak dan kepribadian bangsa dengan tujuan mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, penelitian ini menafsirkan bahwa pelaksanaan PON XX Tahun 2021, sebagai bentuk strategi pembangunan di Provinsi Papua dengan tujuan tidak hanya pada sebuah ajang prestasi secara nasional, namun pasca pelaksanaan PON XX meninggalkan sejumlah sumber daya baik fisik dan non fisik. Konsekuensi ketersediaan sumber daya pasca PON XX, wajib adanya perencanaan tata kelola sehingga ada kejelasan pemetaan sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab. Urgensi perencanaan kebijakan tata kelola pasca PON XX, bahwa sejumlah sarana dan prasarana harus dimanfaatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, selain itu mampu memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini meyakini bahwa optimalisasi investrasi sumber daya baik fisik dan non fisik PON XX, secara serius melalui perencanaan kebijakan tata kelola mampu menjadi motor penggerak daya saing pembangunan, di Provinsi Papua dimasa yang akan datang. Aset PON dapat dijadikan sebagai alat pemantapan sumber daya manusia di Papua pada bidang olahraga, selian itu juga aset tersebut dapat menjadi *input* pembangunan daerah di Provinsi Papua. Beberapa catatan empiris bahwa pelaksanaan PON XVII di Kalimantan Timur, seperti penelitian Gani (2008) menemukan pada saat pelaksanaan PON mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan volume usaha, modal, akses pembiayaan, kelembagaan UMKM.

Momentum pelaksanaan PON XX Tahun 2021 Provinsi Papua sudah tentu memberikan dampak pada masyarakat dengan skala usaha kecil dan menengah. Namun menjadi tantangan secara kebijakan nasional maupun daerah ialah keberlanjutan pasca pelaksanaan PON XX. Jika ditelusuri banyak sekali kasus mengenai kurang optimalnya pengelolaan kebijakan pasca pelaksanaan agenda besar nasional, penelitian ini memiliki asumsi kondisi tersebut terjadi akibat kurang siapnya instrumen pengelolaan tata kelola. Penelitian ini mencoba memetakan opini pemangku kepentingan yang berasal dari golongan pemerintah pada level pusat dan daerah, berdasarkan konten yang dimuat pada media *online* resmi. Secara umum opini pemangku kepentingan pada penelitian ini disebut sebagai *expert evidence* mengharapakan momentum pelaksanaan PON XX perlu optimal memanfaatkan utilitas infrastruktur yang telah terbangun, sehingga ada dampak sosial ekonomi, daya saing manusia di Papua, serta mendorong daya saing pembangunan nasional di wilayah Timur Indonesia. Beberapa fakta empiris penelitian ini menurut konten dari *expert evidence* dengan klasifikasi berdasarkan arah kebijakan sektoral yaitu: infrastruktur, ekonomi, tata kelola, nasionalisme, dan agenda internasional.

Tabel 1. Tabulasi dan Analisis Opini *Expert Evidence*

Analisis	Sumber Data	Fokus <i>Expert Evidence</i> (%)				
		Infrastruktur	Ekonomi	Tata kelola	Nasionalisme	Agenda Internasional
<i>Assessment</i>	1. sport.detik.com 2. ekonomi.bisnis.com 3. liputan6.com 4. papua.inews.id 5. jubi.co.id 6. indonesia.go.id 7. bappeda.papua.go.id	27.27	18.18	40.91	9.09	4.55
<i>Envision</i>	1. sport.detik.com 2. liputan6.com 3. kompas.com 4. news.detik.com 5. jawapos.com 6. infopublik.id 7. indonesia.go.id 8. bappeda.papua.go.id	18.18	31.82	18.18	22.73	9.09
<i>Plan</i>	1. kemenpora.go.id 2. news.detik.com 3. liputan6.com 4. regional.kompas.com 5. medcom.id 6. republik.co.id 7. id.berita.yahoo.com 8. bisnis.tempo.com 9. tribunnews.com	10.71	14.29	35.71	14.29	25.00

Sumber: Data diolah, Tahun 2022

Unit analisis *assessment*, melalui 7 media online ternyata sebanyak 40,91 persen memiliki ungkapan bahwa tata kelola PON XX Tahun 2021 Provinsi Papua menjadi penting, salah satu ungkapan dalam media online Jubi (2021) Presiden Joko Widodo, mempertegas bahwa, setelah pelaksanaan PON XX Tahun 2021 Provinsi Papua selesai, venue yang terbangun tidak boleh terbengkalai. Selain itu juga 27,27 persen kekuatan akses ketersediaan Infrastruktur yang telah disediakan saat ini harus mendapatkan perhatian serius mengenai tata kelola kebijakan, ungkapan dalam Kencana (2021) Infrastruktur *hoki outdoor*, telah memperoleh sertifikasi oleh *Federation Internationale de Hockey*, Stadion Papua Bangkit, mengantongi museum rekor dunia Indonesia, dan fasilitas akuatik telah mendapatkan pengakuan sertifikasi oleh *federation internationale de natation (FINA)*.

Untuk unit analisis *Envision*, harapan besar tergambar dari ungkapan dalam media *online*, bahwa selain kemajuan utilitas infrastruktur, 31.82 persen konten *expert evidence* mengharapkan adanya dampak terukur pada pembangunan sosial ekonomi bagi masyarakat Provinsi Papua, selain itu 22.73 persen bahwa pasca pelaksanaan PON XX di Papua mampu menumbuhkan rasa nasionalisme.

Sedangkan unit analisis *Plan*, sama halnya dengan sebelumnya bahwa konten yang mendapatkan perhatian *expert evidence* ialah tata kelola sebanyak 35,71 persen, tata kelola menjadi penting untuk mendapatkan arahan strategis dari pemerintah daerah Provinsi Papua dan pemerintah pusat. Dalam Syahputra (2021), Menpora-RI menegaskan bahwa, pemerintah daerah perlu mempersiapkan perencanaan pengelolaan infrastruktur pasca PON XX Tahun 2021. Selanjutnya perhatian mendesak lainnya ialah, memanfaatkan peluang ini dalam upaya memperluas dampak ekonomi dan juga memperkokoh rasa nasionalisme di Provinsi Papua.

Melalui narasi yang dihimpun pada media online yang terbagi dalam unit analisis *assessment*, *envision*, *plan* menggambarkan kecenderungan konten mereka, dalam penelitian ini kami sebut sebagai harapan *expert evidence* terhadap

manajemen strategi pemerintah daerah Provinsi Papua ataupun pemerintah pusat, dalam rangka pemanfaatan sumber daya PON XX. Pemetaan hasil konten analisis diatas perlu dirumuskan lebih lanjut, kedalam konsep manajemen strategi sehingga mampu memetakan hirarki manfaat secara jelas. Berikut hasil pemetaan model tata kelola PON XX Tahun 2021 Provinsi Papua.

Tabel 2. Model Tata Kelola PON XX Tahun 2021 Provinsi Papua

<b>Hierarchy</b>	<b>Performance</b>	<b>Means Of Verification</b>	<b>Assumption</b>
<b>Result</b>	<b>Impact</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingginya rasa nasionalisme di Provinsi Papua;</li> <li>2. Terbentuknya daya saing sumber daya pemuda Provinsi Papua;</li> <li>3. Tumbuhnya ekonomi inklusif di Provinsi Papua;</li> <li>4. Kurangnya angka kesenjangan dan kemiskinan ;</li> </ol>	<b>Dampak jangka panjang yang diharapkan dari pasca PON XX Papua Tahun 2021.</b> Dampak ini dapat terlaksana, apabila kerangka hirarki level <i>outcome</i> dapat dihasilkan.
	<b>Outcome</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Papua rumah bagi keberagaman kekayaan etnik di Indonesia;</li> <li>2. Provinsi Papua sebagai rumah atlit berprestasi bagi Indonesia emas;</li> <li>3. Penyelenggaraan agenda olahraga pada tingkat nasional dan internasional (Asia Pasifik);</li> <li>4. Kolaborasi <i>n-helix</i> untuk pengelolaan infrastruktur PON XX Papua;</li> </ol>	<b>Hasil pada level Outcome,</b> memiliki keterkaitan dengan capaian implementasi, pada kualitas dan kuantitas hirarki level <i>output</i> .
<b>Implementation</b>	<b>Output</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat kerukunan umat di Provinsi Papua;</li> <li>2. Pertumbuhan ekonomi non tambang;</li> <li>3. Digitalisasi UMKM;</li> <li>4. Pelatihan terfokus untuk atlit/pelatih Papua, persiapan agenda olahraga internasional;</li> <li>5. Kerjama sama pengelolaan aset PON XX Papua;</li> <li>6. Pemanfaatan venue PON XX Papua secara regular dan terencana;</li> </ol>	<b>Hasil pada level output,</b> memiliki keterkaitan dengan capaian implementasi, pada kualitas hirarki level <i>process</i> .
	<b>Process</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsistensi event olahraga yang diselenggarakan oleh Koni Provinsi Papua;</li> <li>2. Pemberdayaan olahraga sejak dini;</li> <li>3. Pemantapan pengelolaan aset venue Pon XX Papua;</li> <li>4. Optimalisasi asset sebagai upaya kemandirian fiskal;</li> <li>5. Penyediaan Regulasi terkait pengelolaan Venue PON XX;</li> <li>6. Kerjasama dengan swasta dan perguruan tinggi, dalam pemanfaatan aset PON XX;</li> </ol>	<b>Hasil pada level Process,</b> memiliki keterkaitan dengan kualitas kebijakan pada hirarki level <i>input</i> .
	<b>Input</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Kelengkapan administrasi pengelolaan pasca PON</li> </ol>	<b>Hasil pada level Input,</b> memiliki keterkaitan dengan tujuan utama

Hierarchy	Performance	Means Of Verification	Assumption
		XX Papua; 2. Dukungan alokasi otonomi khusus; 3. Dukungan APBD Papua/Kab/kota dalam penyediaan anggaran pasca-PON XX Papua; 4. Dukungan APBN, melalui mekanisme transfer pemerintah pusat; 5. Penyediaan rencana pengembangan pemanfaatan infrastruktur venue pasca-PON XX Papua;	pemanfaatan tata kelola PON XX.

Sumber: Data diolah, Tahun 2022

Pemetaan model tata kelola PON XX tahun 2021 Provinsi Papua merupakan bagian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. *Result based management* mengarahkan kebijakan perlu diambil berdasarkan fakta-fakta ilmiah, hal terpenting pengambilan kebijakan publik terkait tata kelola PON XX berbasis pada tantangan atau permasalahan. Sesuai dengan pemetaan fokus *expert evidence* diharapkan adanya perubahan mendasar bagi Provinsi Papua konten ini tercermin pada model *result based management*, kami sebut sebagai capaian level *impact* yaitu: (1) tingginya rasa nasionalisme, (2) terbentuknya daya saing sumber daya pemuda, (3) tumbuhnya ekonomi inklusif, (4) kurangnya angka kesenjangan dan kemiskinan. Inilah hasil pemetaan kondisi yang diharapkan melalui pelaksanaan PON XX, sehingga setiap konten ini dapat diklasifikasikan berdasarkan level hirarki sehingga menjadi rujukan dalam proses kebijakan tata kelola pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Guna mencapai level hasil pada hirarki *outcome*, maka cukup penting untuk melaksanakan strategi/kebijakan yang menghasilkan luaran: Papua rumah bagi keberagaman kekayaan etnik di Indonesia, rumah atlet berprestasi bagi Indonesia emas, penyelenggaraan agenda olahraga pada tingkat nasional dan internasional (Asia Pasifik), kolaborasi *n-helix* untuk pengelolaan infrastruktur PON XX di Papua. Tentunya capaian level hirarki *outcome* tidak dapat hanya di motori oleh pemerintah daerah Provinsi Papua, perlu adanya orientasi manajemen strategi yang serupa dengan pemerintah daerah, selain itu koordinasi dan bentuk kesepakatan dengan pemerintah pusat mengenai capaian hirarki level *outcome* ini. Konsekuensi logis dari kerangka model *result based management* bagi pemerintah daerah Provinsi Papua ialah kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan dalam kerangka pengelolaan sumber daya fisik atau non fisik PON XX Papua. Pada konteks berpikir kerangka logis ini pencapaian level *outcome* akan bergantung pada kualitas dan kuantitas capaian pada level implementasi, setidaknya penelitian, peneliti menemukan minimal masing-masing adanya 6 luaran level *output* dan level *process*, sedangkan pada level *input* membutuhkan minimal 5 luaran. Model tata kelola PON XX tahun 2021 Provinsi Papua perlu disusun dengan kerangka logis yang jelas, sehingga adanya tanggungjawab serta orientasi peran yang sama antar level pemerintahan. Penelitian ilmiah ini memberikan konsep berpikir berbasis pada hasil, sehingga perlu adanya interpretasi lebih lanjut terkait luaran pada masing-masing hirarki level capaian, melalui pemikiran dan konsep pada setiap *expert evidence* yang berada di pemerintah daerah Provinsi Papua, dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

## PENUTUP

Penelitian ini memberikan potensi referensi ilmiah guna proses pengambilan kebijakan melalui interaksi *miles* dan *huberman*, dengan temuan penelitian kecenderungan *expert evidence* sebagai berikut: (1) *Assessment*: Memperhatikan pemanfaatan utilitas infrastruktur PON XX, kebijakan tata kelola pasca PON XX; (2) *Envision*: PON XX Papua harus berdampak pada sosial ekonomi dan rasa nasionalisme masyarakat Papua; (3) *Plan*: Penyusunan kebijakan tata kelola pemanfaatan PON XX. Berbagai konten yang diperoleh dari *expert evidence*, menjadi dasar dalam penyusunan hirarki kebijakan tata kelola PON XX tahun 2021 Provinsi Papua. *Result Based Management* menemukan terdapat 4 luaran level *impact* yang menjadi tantangan pengelolaan pasca PON XX dimasa mendatang, pada level *outcome* terdapat 4 luaran, sedangkan untuk level *output* dan level *process* masing-masing terdapat 6 luaran, selanjutnya level hirarki *input* membutuhkan minimal 5 luaran.

Minimnya referensi ilmiah terkait manajemen strategik pada pengelolaan pasca PON menjadi pertimbangan penelitian ini, adapuan keterbatasan penelitian induktif ialah *expert evidence* dominan berasal dari birokrat pemerintah pusat. Untuk itu menjadi pertimbangan pada studi lanjutan guna memperkaya konten yang diharapkan *expert evidence* pada lingkup pemerintah daerah Provinsi Papua dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Selain itu juga jika telah tersedia regulasi yang mempedomani tata kelola PON XX, dapat dijabarkan sesuai kewenangan *result based management* serta menyusun tolak ukur kinerja pada masing-masing level hirarki.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ayani, Dhita Deviacita., Helen Sasty Pratiwi., dan Hafiz Muhardi. 2019. Implementasi web scraping untuk pengambilan data pada situs marketplace. *JUSTIN (Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi)*. Vol. 7, No. 4. Hal: 257-262.
- Bappeda. 2015. *Masterplan Infrastruktur dan Pengembangan Ekonomi PON XX di Provinsi Papua*. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Papua. Kota Jayapura.
- Gani, I. (2008). Dampak Penyelenggaraan PON XVII Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal di Provinsi Kalimantan Timur. *INOVASI (Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen)*, 4(1). 265-270.
- IPQI. (n.d). *Mengenal Result-Based Management*. Diakses pada 3 Oktober 2021. <https://ipqi.org/mengenal-result-based-management/>.
- Jubi. (2021, 4 Oktober). *Menpora ingatkan tak ada venue yang terbengkalai pasca-PON XX*. Diakses pada 6 Oktober 2021. <https://jubi.co.id/menpora-ingatkan-tak-ada-venue-yang-terbengkalai-pasca-pon-xx/>.
- Kencana, M. R. B. (2021, 2 Oktober). *Jokowi Minta Infrastruktur PON XX Dorong Geliat Ekonomi Papua*. Liputan6. Diakses pada 3 Oktober 2021. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4673905/jokowi-minta-infrastruktur-pon-xx-dorong-geliat-ekonomi-papua>
- Kompas. (2021, 4 Oktober). *Sri Mulyani Ungkap PON XX Papua Habiskan Duit APBN Rp.10,43 Triliun*. Diakses pada 10 Oktober 2021. <https://money.kompas.com/read/2021/10/04/093428726/sri-mulyani-ungkap-pon-xx-papua-habiskan-duit-apbn-rp-1043-triliun?page=all>.
- KSP. (2021). *Pembangunan Infrastruktur Modal Mencapai Tujuan Kesejahteraan Papua*. Diakses pada 3 Oktober 2021. <https://ksp.go.id/pembangunan-infrastruktur-modal-mencapai-tujuan-kesejahteraan-papua.html>.
- Kusek, J. Z., & Rist R. C. (2004). *Ten Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System : A Handbook for Development Practitioners*. Washington DC: The World Bank
- Locke, E. A. (1968). *Toward A Theory of Task Motivation and Incentives*. *Organizational Behavior and Human Performance*, 3(2).157-189.
- Luneburg, F. C. (2011). Goal Setting Theory of Motivation. *International Journal Management, Business, and Administration*, 15(1), 1-6.
- Nugrahani. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Cakra Books.
- Syahputra, E. (2021, 4 Oktober). *Menpora Ingatkan Pemda Rawat Fasilitas Olahraga Pasca PON Papua*. *Detiknews*. Diakses pada 10 Oktober 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5753053/menpora-ingatkan-pemda-rawat-fasilitas-olahraga-pasca-pon-papua>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007. *Penyelenggaraan Keolahragaan*. Jakarta.
- PUPR. (2021, 1 April). *Infrastruktur papua dan papua barat terus dibangun kementerian pupr, dari jalan hingga pemukiman*. Diakses pada 10 Oktober 2021. <https://www.pu.go.id/berita/infrastruktur-papua-dan-papua-barat-terus-dibangun-kementerian-pupr-dari-jalan-hingga-pemukiman>.
- Presidenri, (2021, 2 Oktober). *Presiden Jokowi Resmi Buka PON XX Papua Tahun 2021*. Diakses pada 10 Oktober 2021. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-resmi-buka-pon-xx-papua-tahun-2021/>.



Solechan, A., & Prasandy, T. (2016). Rancang Bangun Tata Kelola Kinerja Perguruan Tinggi Menggunakan IT Balanced Scorecard. *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*, 6(1), 84–89.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005. *Tentang Sistem Keolahragaan Nasional*. Jakarta.